

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BERAS BULOG UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA LUBUKLINGGAU (STUDI KASUS PERUM BULOG KANSILOG KOTA LUBUKLINGGAU)

Oleh: Artiyanto

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

afri_wongkito@yahoo.com

Abstrak

Dalam mengatur masalah pangan di Indonesia pemerintah membentuk Perum BULOG Kansilog di bawah naungan BUMN. Bulog bertugas menjaga ketersediaan beras, keterjangkauan dan stabilitasi harga. Perum BULOG Kansilog dalam kebijakan pengadaan beras Bulog untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan adanya CBP (cadangan beras pemerintah) dan OP (operasi pasar). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan beras bulog untuk mewujudkan ketahanan di kota Lubuklinggau belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan ini sehingga pengadaan beras belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh Perum BULOG Kansilog pusat.

Kata kunci: Kebijakan, Pengadaan dan Ketahanan Pangan

A. Pendahuluan

Dewasa ini, peran sektor pertanian dirasakan semakin penting dengan diberlakukannya era pasar bebas dan otonomi daerah. Sektor pertanian tidak saja harus mampu menyediakan bahan pangan, menyerap tenaga kerja, tetapi juga harus dapat menyediakan bahan baku industri olahan, dan produk lainnya sebagai sumber devisa negara. Selain itu, dengan telah diterapkannya program pembangunan sektor pertanian kearah peningkatan ketahanan pangan, dan terciptanya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi, maka implementasi program secara konsisten di pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh potensi nasional.¹

Program peningkatan ketahanan pangan sangat mengandalkan kemampuan domestik dengan mendorong pemanfaatan sumber kekayaan alam wilayah sebagai produk unggulan

¹ A. Suryana, S Mardianto, *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, (Jakarta: LPEM UI, 2001), hlm 57-60.

wilayah, dengan cara mengembangkan agribisnis dan agroindustri pertanian sebagai penghela pembangunan daerah.

Kondisi ketahanan pangan nasional saat ini belum mencapai tingkat kemantapan atau kurang tangguh. Hampir semua aspek penunjang ketahanan pangan, masih dibelenggu oleh masalah. Mulai dari kebijakan yang belum bisa berjalan secara konsisten, manajemen pangan yang sering kedodoran, sampai lemahnya antisipasi terhadap bencana lingkungan, baik berupa musim kemarau yang panjang maupun banjir.²

Perum BULOG Kansilog yang ada di Lubuklinggau merupakan sebuah perusahaan yang dinaungi pemerintah atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menangani bahan pokok salah satunya yaitu beras, selain itu juga Perum BULOG Kansilog Lubuklinggau mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan pembelian gabah atau beras oleh pemerintah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah; Penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, dan bantuan, Perum BULOG Kansilog yang akan di jadikan sebuah penelitian terletak di Taba Pingin, Lubuklinggau Selatan II, dalam pelaksanaan pengadaan beras, masih terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan dalam proses implementasi kebijakan pengadaan beras pada saat ini.

Pengusaha kilang padi yang tidak berkenan menjual berasnya kepada Bulog karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari pada harga pasaran, lebih memilih untuk menjual berasnya kepada pedagang pengecer atau kepada daerah lainnya. Apabila Bulog tidak dapat membeli beras dari pengusaha kilang padi, maka gudang penyimpanan beras akan terancam kosong dan Bulog tidak mempunyai stok beras. Kekosongan gudang Bulog akan mengakibatkan terkendalanya penyaluran bansos rastra. Bulog harus menunggu kiriman beras dari daerah yang mempunyai surplus beras seperti Lubuklinggau, Musi rawas dan Musi Rawas Utara untuk pemenuhan penyaluran raskin. Walaupun masyarakat setempat akan tetap menerima Bansos Rastra dari Bulog, akan terjadi keterlambatan waktu dalam penyalurannya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkatnya ke dalam sebuah judul penelitian yang diberi judul: ***“Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Bulog***

² Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 DAN SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), hlm. 2.

Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Perum BULOG Kansilog Di Kota Lubuklinggau)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan beras BULOG untuk mewujudkan ketahanan pangan di kota Lubuklinggau?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan pengadaan beras BULOG untuk mewujudkan ketahanan pangan di kota Lubuklinggau?

C. Kerangka Teoritik

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dan administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*.³ Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out succesfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaaratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi/publik ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mendapat tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimpelemntasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Bulog Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Lubuklinggau

Dalam pengadaan beras untuk ketahanan pangan, Bulog kota Lubuklinggau memiliki tim yang kuat yang terdiri dari Kepala Gudang bersama karyawan yang lain harus memiliki totalitas yang tinggi terhadap suatu pekerjaan agar tercapainya kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan. Menurut wawancara terkait dengan pengadaan beras yang diungkapkan oleh Pimpinan Perum BULOG Kansilog Lubuklinggau Bapak Meizarani.⁴

³ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990), hlm 1.

⁴ Wawancara, Bapak Meizarani sebagai Pimpinan Perum BULOG Kansilog, tanggal 24 November 2018.

“Pengadaan beras adalah pembelian beras yang dilakukan oleh Bulog untuk menjaga keamanan stok. Dan juga pengadaan beras pada saat ini di Lubuklinggau sudah berjalan lancar tetapi belum sesuai dengan keinginan”

Perum BULOG Kansilog dalam melakukan pengadaan beras saat ini sudah berjalan dengan lancar akan tetapi belum sesuai dengan keinginan, Bulog berharap agar pemerintah dapat ikut serta dan bekerjasama dalam menjaga pengadaan beras terkhusus di kota Lubuklinggau. Akan tetapi dalam pengadaan beras terdapat kendala seperti yang dikatakan oleh Ibu Ayu Pasma Linda.⁵

“Bila harga terlalu tinggi, maka Bulog tidak bisa menyerap karena harga telah ditetapkan oleh pemerintah, kecuali beras komersial. Akan tetapi Bulog sendiri dalam mengatasi kendala tersebut bisa dilakukan dengan cara membeli untuk dijual kembali/ komersial.

Sementara itu ketahanan pangan yang ada di Lubuklinggau yang di ungkapkan oleh Bapak Radi Wagino.⁶

Bulog saat ini hanya mendapatkan penugasan sesuai penyaluran pemerintah, jadi bulog tidak lagi memonopoli pasar, untuk memenuhi CBP (cadangan beras pemerintah) saat ini cukup. karena pemerintah harus mempunyai cadangan stok beras untuk seluruh Indonesia sebesar 1 juta ton untuk memenuhi cadangan stok selama 4 bulan dan saat ini Bulog memiliki 2,5 juta ton jadi bisa dikatakan aman.

Hal sedemikian rupa tentang pengadaan ketahanan pangan maka terdapat implementasi kebijakan yang di lakukan oleh Bulog Lubuklinggau seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Roby Pujangga.⁷

“Kebijakan pengadaan beras dalam beberapa tahun ini belum maksimal tergantung kondisi harga yang ada dan untuk tahun ini Bulog di Lubuklinggau mendapatkan beras 2100 ton untuk memenuhi kebutuhan beras di kota Lubuklinggau didapatkan oleh sektor lain seperti Oku, Palembang dan Jawa dikarenakan untuk wilayah Lubuklinggau belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan diatur pula dalam Inpres No 5 tahun 2015.”

Maka dari itu peran Bulog sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan sebab pangan menjadi kewajiban pokok yang harus terpenuhi dalam kebutuhan manusia itu sendiri. Dan di sisi lain juga dalam mengatur harga itu perlu diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan, karena harga sering juga menghambat lajunya penyaluran tersebut. Untuk memaksimalkan kebijakan perlu adanya kerjasama antara pemerintah, dan seluruh karyawan yang ada di Perum BULOG Kansilog. Sehingga permasalahan tersebut bisa dikendalikan.

⁵ Wawancara, Ibu Ayu Pasma Linda sebagai Staff Kansilog, tanggal 24 November 2018.

⁶ Wawancara, Bapak Radi Wagino sebagai petugas operasional, tanggal 25 November 2018.

⁷ Wawancara, Bapak Roby Pujangga sebagai petugas kerani, Pada hari rabu tanggal 25 November 2018.

2. Faktor-faktor Penghambat Dan Pendukung Kebijakan Pengadaan Beras Bulog Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di kota Lubuklinggau

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan ketahanan pangan di Lubuklinggau seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najib Bahrowi.⁸

“Faktor penghambat seperti; cuaca, gagal panen, hama, harga tidak sesuai, pedagang luar, bencana alam dan harga relatif tinggi. Faktor pendukung; produksi banyak, harga di bawah HPP, petani tidak terikat pada sistem ijon.”

Karena pada saat ini masyarakat sering mengeluh dengan kondisi sekarang yang terjadi apalagi keadaan ekonomi yang semakin hari semakin memperhatikan. Ketidakstabilan ekonomi berdampak pada harga khususnya pada beras ancaman (*threat*) tersendiri. Belum nanti di tambah bila terjadi musibah, gagal panen, dan cuaca yang tidak stabil.

Senada hal lain wawancara yang dalam mempertahankan pangan yang ungkapkan oleh Ibu aci Fauziah.⁹

“Kami selalu memantau harga beras di tingkat petani, selalu melakukan operasi pasar dan melakukan penyaluran melalui CBP (cadangan beras pemerintah).”

Sementara itu wawancara beras yang ada digudang untuk di perjualkan, hal demikian di ungkapkan oleh Bambang Widiyanto.¹⁰

“Bulog sesuai dengan penugasan pemerintah yaitu CBP (cadangan) dan OP (operasi pasar) hanya memiliki skema penjualan beras komersial yang batas penjualan tidak di tentukan serta batas umur beras yang ada di gudang 6 bulan.”

Adapun permasalahan yang ada Bulog pada saat ini khususnya di Lubuklinggau, yang diungkapkan oleh Bapak Roby Pujangga.¹¹

“Saat ini bulog tidak lagi menyalurkan beras Rasta sehingga beras yang ada di Bulog terancam busuk”.

Perum BULOG Kansilog merupakan perusahaan umum milik Negara yang bergerak dibidang logistik pangan pada tahun 1967 Perum BULOG Kansilog memiliki tugas untuk menyediakan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, seiring berjalannya waktu Gudang Badan Urusan Logistik Lubuklinggau dibuka dan diresmikan pada 18 Desember 1992 yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 09 Kel. Taba Pingin.

⁸ Wawancara, Bapak Najib Bahrowi sebagai petugas kerani PLT Kepala Gudang Taba Pingin, tanggal 25 November 2018.

⁹ Wawancara, Ibu Aci Fauziah sebagai petugas menku Kansilog, tanggal 25 November 2018.

¹⁰ Wawancara, Bambang Widiyanto sebagai penjualan, tanggal 26 November 2018.

¹¹ Wawancara, Roby Pujangga sebagai Kerani, tanggal 26 November 2018.

Bulog saat ini hanya mendapatkan penugasan sesuai penyaluran pemerintah, dan Bulog juga dalam penyaluran beras melalui CBP (cadangan beras pemerintah) dan OP (operasi pasar). Oleh sebab itu perlunya kerjasama yang erat antara pemerintah dan Bulog sangat berarti karena bila tidak ada kerjasama yang erat nantinya akan berantakan di tambah lagi permasalahan seperti harga dan lain-lain.

Maka dari itu dalam tahapan kebijakan publik, proses implementasi merupakan suatu tingkatan yang pada dasarnya dilakukan untuk menentukan hasil dari suatu pelaksanaan dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan publik merupakan penerapan dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga mencapai tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Pada tahapan implementasi ini, tentu akan ditemukan variabel-variabel yang terkait dengan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mendapat tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplemmentasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Mazmanian dan Sebatier memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dalam langkah berurutan sebagai berikut: Identifikasi masalah yang harus diintervensi, dan merancang struktur implementasi.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.¹²

Allah berfirman dalam surat As-Syuraa: 38:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S As-Syuraa: 38).¹³

¹² Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hlm 140-142.

¹³ Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid, *Tajwid Warna*, (Bandung: Diponogoro), 2010.

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai urusan. Musyawarah sendiri akan lebih kentara pada urusan-urusan yang berhubungan dengan orang lain atau muamalah, salah satunya adalah urusan bisnis. Dalam bisnis, musyawarah sering disebut dengan rapat. Artinya, berkumpul bersama-sama untuk membicarakan masalah-masalah atau rencana-rencana yang harus diselesaikan demi kepentingan bersama. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan musyawarah karena banyak manfaat yang dapat di ambil darinya. Bagaimanapun, pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran satu orang.

Berdasarkan data penelitian yang dapat dilapangan, Bulog Lubuklinggau terdapat faktor penghambat dan pendukung kebijakan pengadaan pangan di Lubuklinggau terdapat beberapa Faktor penghambat seperti; cuaca, gagal panen, hama, harga tidak sesuai, pedagang luar, bencana alam dan harga relatif tinggi. Faktor pendukung; produksi banyak, harga di bawah HPP, petani tidak terikat pada sistem ijon.

Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian besar makanan pokok penduduk berasal dari sereal yang terdiri dari beras, jagung dan terigu dan terbesar sebagai makanan pokok penduduk adalah beras. Oleh karena itu masalah ketahanan pangan di Indonesia menjadi penting untuk kesetabilan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan utama yang harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia khususnya di Lubuklinggau. Hal itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Indonesia mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian, Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan yang mata pencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, perlunya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang dirancang untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan. Keempat, tersedianya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup melimpah. Kelima, sancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri dari produk dalam negeri, sehingga tidak harus tergantung pada produk-produk pertanian luar Sumatera Selatan yang suatu ketika harganya menjadi mahal.

Tantangan yang di hadapi Perum BULOG Kansilog dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga tiga faktor tersebut dalam mengatasi untuk kebijakan ketahanan pangan masih belum sesuai dengan keinginan, belum juga stok beras tidak berasal dari wilayah Lubuklinggau bahkan masih mendapatkn beras dari luar

Libggau seperti Oku, Palembang dan Jawa, di tambah juga dengan fasilitas tani yang belum memenuhi standar. Itu menjadi sebuah tantangan seirus dalam Bulog.

Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum BULOG Kansilog ini juga memiliki dampak negatif seperti perubahan kualitas atau penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras terjadi setelah enam bulan keatas.Namun, penimbunan yang dilakukan sudah di perhitungkan sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan pangan serta dilakukan perawatan rutin dalam jangka waktu enam bulan untuk menjaga beras yang ditimbun dalam gudang. Sebab beras tidak boleh melewati batas umur yang ditentukan.

Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri berawal dari produksi petani. Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan “semangat” berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*) dapat tercapai.

Petani dengan adanya HPP mempunyai perkiraan harga untuk melepas produksinya. Pilihan pasar yang terbuka antara Bulog dan pasar umum diharapkan akan memberikan daya tawar yang lebih baik bagi petani. Dengan HPP sebagai patokan harga jualnya, petani bisa memilih untuk menjual ke pasar umum atau ke Bulog. Dari sisi operasional Bulog, terdapat tiga saluran dalam penyerapan produksi petani yaitu Satgas, Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) dan Mitra Kerja. Ketiga saluran tersebut membeli gabah langsung pada petani dengan patokan HPP. Umumnya gabah yang dibeli adalah gabah pada kualitas apa adanya (di luar kualitas yang ada dalam Inpres). Sedangkan gabah yang diterima Bulog adalah Gabah Kering Giling (GKG) yaitu gabah dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa kotoran maksimum 3%. Kualitas ini cukup tahan disimpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada saatnya.

Dan dari hasil data penelitian Bulog Lubuklinggau terdapat faktor penghambat dan pendukung kebijakan pengadaan pangan di Lubuklinggau masih perlu banyak yang harus dibenahi.

E. Penutup

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan pengadaan beras Bulog untuk mewujudkan ketahanan pangan di kota Lubuklinggau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut: Kansilog Bulog merupakan sebuah perusahaan yang di naungi pemerintah atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menangani bahan pokok salah satunya yaitu beras, selain itu juga Perum Bulog Lubuklinggau mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan pembelian gabah atau beras oleh pemerintah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah; Penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, dan bantuan. Pertama; Implementasi Kebijakan pengadaan beras Bulog untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuklinggau kebijakan yang dilakukan Bulog dalam mewujudkan ketahanan pangan saat ini masih belum sesuai, karena Bulog hanya mendapatkan penugasan dari pemerintah sesuai dengan Inpres No 5 tahun 2015. Kedua; Faktor penghambat pengadaan beras oleh Bulog Lubuklinggau antara lain: cuaca, gagal panen, hama, harga tidak sesuai, pedagang luar, bencana alam dan harga relatif tinggi. Faktor pendukung; produksi banyak, harga di bawah HPP, petani tidak terikat pada sistem ijon.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, dan Saebani, Ahmad Beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Al-Arif, Nur Rianto M., *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia: Bandung.
- Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid, *Tajwid Warna*, (Bandung: Diponogoro), 2010.
- Dwidjowijoto, Nugroho Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.

- Edward, George C III, (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
Goggin, Malcolm L *et al.* 1990.
- Grindle, Merile S.. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jurnal Ilmiah Iqthishaduna, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam (IAI) Azhaar Lubuklinggau, edisi Vol 2 No 3, Juni 2017, hlm 10-14.
- Paul, A. Sabatier, Mazmanian, Daniel A and. *Implementation and Public Policy*, Scott (Foresman and Company, USA, 1983.
- Purwanto, Agus Erwan, Sulistastuti Ratih dyah, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 DAN SMA*, Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016.
- Purwanto, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.
- Suharto Edi, Ph.D *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cetakan-19, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Global Media Informasi, 2008.
- Suryana, A Mardianto S, *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, Jakarta: LPEM UI, 2001.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Ed. 3, cet. 26, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.